



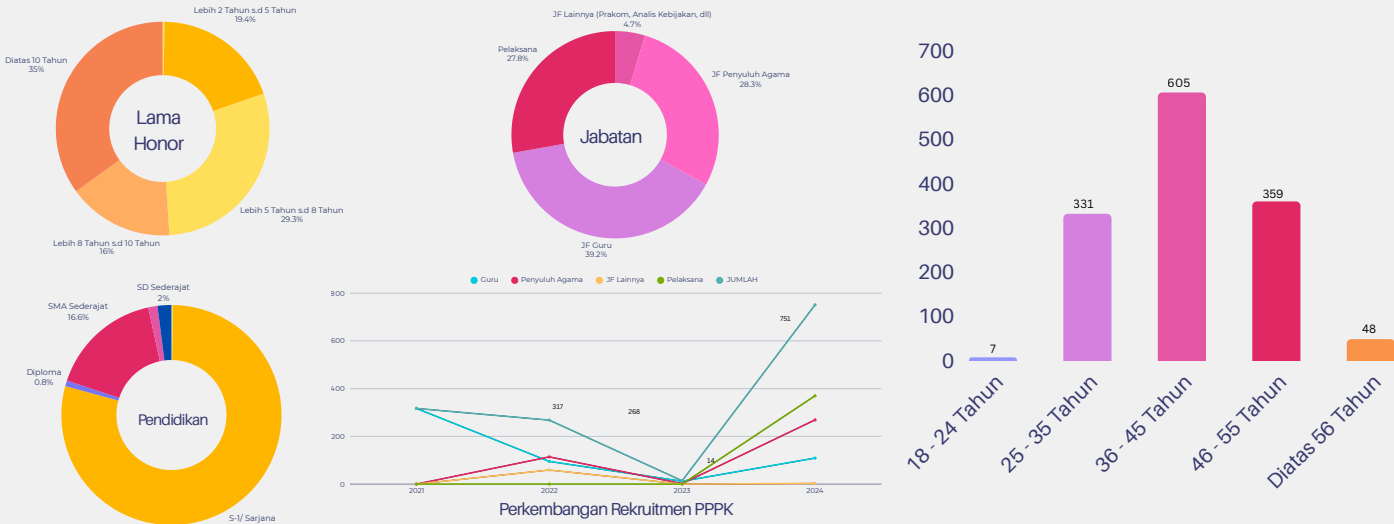
# KINERJA DAN KOMPETENSI PPPK UNTUK #KEMENAGBERDAMPAK

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat  
Muhammad Abidin, Analis Kebijakan Ahli Muda



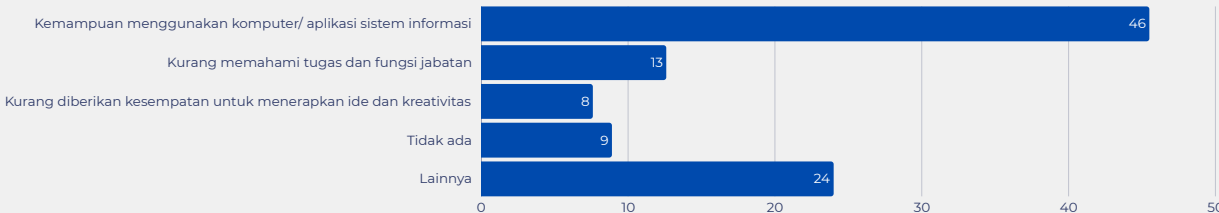
AGUSTUS 2025

## GAMBARAN UMUM



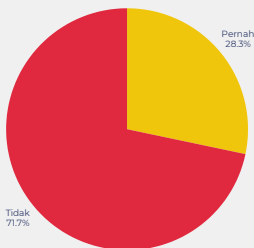
## IDENTIFIKASI MASALAH

### Apa kendala Saudara(i) dalam melaksanakan tugas sebagai PPPK?



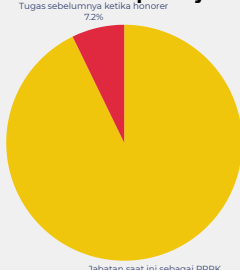
Ketika PPPK ditanya terkait kendala dalam melaksanakan tugas, didapatkan bahwa 46 persen terkendala pada kemampuan komputer/ aplikasi sistem informasi. Ini harus menjadi perhatian dengan Asta Program Prioritas (Protas) pada program Digitalisasi Tata Kelola PPPK yang terkendala pada kemampuan komputer dan aplikasi sistem informasi akan menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi yang seluruhnya mengarah pada sistem informasi sebagai menciptakan good governance dan berbasis digital.

### 2 Tahun terakhir sebelum menjadi PPPK, apakah Saudara (i) pernah mengikuti pelatihan?



Dari kuesioner yang disampaikan, didapati bahwa 71,7 persen PPPK tidak pernah mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan karena sejak pandemi covid-19, lembaga-lembaga pelatihan di instansi pemerintah telah beralih pada metode-metode dengan pemanfaatan teknologi seperti Massive Open Online Course (MOOC) atau e-Learning

### Seandainya ada pilihan, apakah saudara (i) akan melakukan tugas sebelumnya ketika honoror daripada jabatan PPPK saat ini?



Dari kuesioner yang disebar, dari pertanyaan seandainya ada pilihan, apakah saudara (i) akan melakukan tugas sebelumnya ketika honoror daripada jabatan PPPK saat ini?. sebanyak 7,2 persen PPPK memilih tugas sebelumnya ketika honoror. Banyaknya tuntutan dan ketentuan administratif yang harus dipenuhi ketika menjadi Aparatur Sipil Negara kemungkinan menjadi kendala sehingga memilih jawaban tersebut.

## REKOMENDASI

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dideskripsikan di atas, sebagai upaya menciptakan aparatur yang adaptif terhadap kemampuan digitalisasi dan penguasaan teknologi sehingga mampu berdaya saing dan melakukan pelayanan umat yang berdampak, maka disampaikan beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan kemampuan komputerisasi dan sistem informasi bagi PPPK dengan cara pendampingan maupun pelatihan atau kursus mandiri secara masif. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyiapkan aparatur yang siap berkinerja di era digitalisasi. Mewajibkan setiap PPPK memiliki perangkat (laptop) adalah sebuah keniscayaan untuk mendukung kemampuan komputerisasi dan sistem informasi ini.
2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi PPPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Ini sebagai upaya untuk penguatan pelaksanaan pencapaian target organisasi yang tersistematis.
3. mengoptimalkan pola mentoring kepada setiap PPPK , dengan program yang terukur dan memiliki target yang harus dipenuhi oleh PPPK dalam waktu yang telah ditentukan untuk seluruh kemampuan seperti digitalisasi, kompetensi dan penguatan tugas dan fungsi jabatan yang diemban.

Olehnya itu, program penguatan kompetensi dan kinerja PPPK diharapkan menjadi perhatian kepada seluruh pimpinan satuan /unit kerja dengan melibatkan para pengelola kepegawaian dalam Analis Sumber Daya Manusia Aparatur. Evaluasi secara berkala terhadap penguatan kompetensi dan kinerja harus dilakukan bukan hanya sekedarnya saja.